

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adira Fairus. 2019. *Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan*. Temanggung: Literasi Desa Mandiri.
- Andi Nova, Delfina Gusman, Arfiani. 2015. *Ilmu Negara*. Padang: Andalas University Press.
- Angger Sigit Pramukti, M. C. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.
- Budiman Sudjatmiko, dan Yando Zakaria. 2014. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!* Cet: 1 Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Cholillah Suci Pratiwi, Dkk. 2018. *Politik & Pemerintahan di Ranah Lokal*. Yogyakarta: Suluh Media
- David Prasetyo. 2019. *Mengenal Badan Permusyawaratan Desa*, Kalimantan: CV Derwati Press.
- HAW Widjaja. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (p. 308). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2015. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mashuri Mashab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- Muhammad Taufik. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moch. Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Nurman Wahjudin. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahya Anggara dan Ii Sumantri, 2016. *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shanti D. K, Novianto M. H, Denico D. T, dan Monika S, 2018, *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Sopi. 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung.

Umar Nain. 2019. *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Sulawesi: Garis Khatulistiwa.

Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

C. Jurnal dan Skripsi

Emilda Firdaus. *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan DI Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor. 2.

Munawir Kadir. 2016. *Analisis yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*. Arsip Fakultas Hukum UIN Allaudin Makassar.

Karlos Mangoto. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Mela. 2020. *Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sungai Ianan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)*. Skripsi Fakultas Hukum IAIN Bengkulu.

Nofitri Rading. 2018. *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Didesa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*. Journal Administrasi Publik, Volume 4 Nomor. 54.

Patrasius. 2019. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7 Nomor 4.

Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum Volume 7 No. 1.

Neti Sunarti. 2018. *Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa*. Jurnal Unigal, Volume 5 Nomor 2.

Herma Yanti. 2010. *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004*. Jurnal Lex Specialis Nomor 11.

D. Internet

Agung Nugraha. (2020, 09 30). *Tata Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Aspirasi Masyarakat*. Retrieved from Ombudsman: <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tata-tertib-administrasi-badan-permusyawaratan-des-a-terhadap-aspirasi-masyarakat>

Suhendra dan Ryan Hadi. (2020, desember Kamis). *Melihat Toilet Sekolah Rp196 Juta di Bekasi: WC Jongkok*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216134406-20-582883/melihat-toilet-sekolah-rp196-juta-di-bekasi-wc-jongkok>

<https://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-18-sampai-pasal-18b-uud-1945/>

Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Angger Sigit Pramukti, M. C. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.

Firdaus, E. (n.d.). *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan DI Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, no.2*, 1 - 21.

Kadir, M. (2016). Analisis yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa). *Arsip Fakultas Hukum UIN Allaudin Makassar*, 1 - 35.

Mangoto, K. (n.d.). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Ilmu Pemerintahan*, 11.

Mashab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov UGM.

- Mela. (2020). Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sungai Ianan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara). *Skripsi Fakultas Hukum IAIN Bengkulu*, 1 - 93.
- Mela. (2020). Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sungai Ianan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara). *Skripsi Fakultas Hukum IAIN Bengkulu*, 1 - 93.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Sulawesi: Garis Khatulistiwa.
- NOFITRI RADING, F. D. (2018). FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDESA BATAKA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT. *Journal Administrasi Publik*, Vol. 4, no. 54.
- Nugraha, A. (2020, 09 30). *Tata Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Aspirasi Masyarakat*. Retrieved from Ombudsman: <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tata-tertib-administrasi-badan-permusyawaratan-des-a-terhadap-aspirasi-masyarakat>
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patrasius. 2019. PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA LOA DURI ULU KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 4,, 1733 - 1742.
- Solekhan, D. M. 2014. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. In *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum Vol. 7, No. 1*, 82 - 95.
- Suhendra, R. H. (2020, desember kamis). *Melihat Toilet Sekolah Rp196 Juta di Bekasi: WC Jongkok*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216134406-20-582883/melihat-toilet-sekolah-rp196-juta-di-bekasi-wc-jongkok>
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Jurnal Unigal*, Volume 5 no. 2, 46-55.
- Widjaja, H. (2008). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. In H. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (p. 308). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yanti, H. (2010). Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal Lex Specialis No. 11*, 39 - 45.

